

HARIAN
UNTUK UMUM

TERBIT SEJAK
01 MARET 2011

PENDIRI:
Ardi, S.Si, Apt

Baubau Post

erani Beda - Kritis, Lugas, Independen

Baubaupost.com

Jumat
12 Januari 2024

Eceran Rp 5000

Berlangganan Rp 100.000/ bulan

Info Langganan dan Iklan HP/WA: 082160543989

Diskominfo Baubau Gagas Pelayanan Internet Satu Pintu



Kadis Kominfo Baubau Andi Hamzah Mahmud, SSos MSI

Laporan: Ardi

BAUBAU, BP-Upaya menjadikan Kota Baubau sebagai penyelenggara smart city dan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) sebagaimana kota-kota lainnya di Indonesia, terus diupayakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Baubau, salah satunya dengan perencanaan pengintegrasian pelayanan internet satu pintu, namun langkah tersebut diawali dengan pembenahan infrastruktur.

Pj Walikota Baubau Dr Muh Rasman Manafi
Fungsikan Bangsal Pasca Panen Tanganapada



Pewarta: Amat Jr

BAUBAU, BP-Penjabat Wali Kota Baubau Dr. Muh Rasman Manafi, SP, M.Si meresmikan

Bangsal pasca panen Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Jumat (22/12/2023) Dr Muh Rasman men-

gatakan langkah yang di tempuh dengan bekerja bersama itu sesungguhnya bagian dalam upaya

Lanjutkan ke Hal: 7

Jam-Sultra Soroti Dugaan Korupsi pada 10 Paket Pekerjaan di Dinas PUPR Butur

Peliput : Kasrun

BURANGA, BP-Ketua Jaringan Aktivistis Mahasiswa Sulawesi Tenggara (Jam-Sultra), Suar Santo menyoroti dugaan tindak pidana korupsi senilai 1 miliar lebih pada 10 paket pekerjaan di dinas



Suar Santo

Pewarta: Alyakin

Kepala Bapenda Wa Radja: Masih Ada Penghindar Wajib Pajak di Baubau



Kepala Bapenda Baubau Wa Radja SE

Pewarta: Amat Jr

BAUBAU, BP-Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Baubau terus menerus secara intens untuk meningkatkan

penagihan pajak dengan cara melakukan sosialisasi dengan pengawasan di lapangan. Pasalnya terkait penagihan pajak

Lanjutkan ke Hal: 7

“Kami tengah menyusun progress yang kami sebut “Pelayanan Internet Satu Pintu”™, hanya memang harus diakui kendala kita secara general berkaitan

Lanjutkan ke Hal: 7

Ketua TP PKK Baubau Optimis Organisasi Wanita Lebih Baik Ke Depan



Pewarta: Andina L

BAUBAU, BP-Ketua TP PKK Kota Baubau Ibu Reffiani Dwiatmo

Rasman, ST saat upacara peringatan hari ibu ke-95 dan hari ulang tahun dharma wanita persatuan

ke-24 tingkat Kota baubau tahun 2023 merasa optimis kiprah organ-

Lanjutkan ke Hal: 7

SEGENAP PIMPINAN, REDAKSI, & KARYAWAN PT FAREN GRAFIKA

PENERBIT SURAT KABAR HARIAN (SKH) BAUBAU POST (www.baubaupost.com)

Mengucapkan :

Terimakasih Kepada Dewan Pers Yang Telah Menetapkan SKH Baubau Post (www.baubaupost.com) Sebagai Media Terverifikasi per Tanggal 30 Desember 2022



Andina Latief, SKM
DIREKTUR



Diskominfo Baubau Gagasan Pelayanan Internet Satu Pintu

dengan kesiapan infrastruktur pendukung, juga termasuk resource lainnya," kata H. Andi Hamzah Machmud, S.Sos., M.Si "Rabu pagi ini (10/1).

Disebutkan, gagasan Pelayanan Internet Satu Pintu tidak berkaitan dengan teknis pengelolaan turunan penggunaan internet di unit kerja tetapi berkaitan dengan pengelolaan infrastruktur, hal tersebut juga didasari kewajiban pemerintah melakukan pelayanan publik yang merata ke seluruh warga negara, sehingga dalam rangka melaksanakan

kewajibannya itu pemerintah berusaha memperbaiki pelayanannya dengan menggunakan teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi yang mampu mengelola data secara efektif dan efisien serta menghasilkan informasi yang tepat, cepat dan akurat.

"Pelayanan Satu Pintu itu, untuk pemerataan. Kasus sederhananya terdapat unit kerja yang over bandwidth, di satu sisi ada unit kerja yang kekurangan, ini harus di atur secara baik, dan terkelola secara baik pula," ujar Andi Hamzah.

Karenanya, permasalahan secara umum di Kota Baubau di antaranya masih terdapat OPD atau unit kerja yang tidak memiliki akses internet, terdapat OPD yang memiliki akses internet berlebih, tidak sebanding dengan kebutuhan, dan bertambahnya alokasi anggaran penyediaan internet.

Dengan demikian, langkah awal untuk mewujudkan gagasan pelayanan internet satu pintu itu diantaranya melakukan penertiban anggaran internet untuk setiap OPD di bawah Pemerintah Kota Baubau; ISP/ Penyedia internet dipusatkan pada Dinas Komunikasi dan Infor-

matika (Diskominfo) Kota Baubau, Kantor OPD mendapatkan jaringan internet dari aliran akses Diskominfo menggunakan Fiber Optik dan Pemusatan pembagian/konfigurasi jaringan di pusatkan Diskominfo Kota Baubau.

"ini gerakan Bekerja Bersama, jadi pasti kita awali dengan rapat teknis dengan semua OPD, untuk menangkap semua permasalahan, membuat keseragaman ide, lalu kita terapkan. Hal-hal teknis juga akan dibicarakan agar ide besar SPBE Kota Baubau bisa berjalan," tegas Andi Hamzah. (*)

Kepala Bapenda Wa Radja: Masih Ada Penghindar Wajib Pajak di Baubau

yang dilakukan oleh Bapenda setiap hari ini ada beberapa wajib pajak juga apakah kurang paham atau belum bergerak hatinya untuk membayar kewajibannya sebagai wajib pajak. Karena rata-rata masyarakat menghindari dari kewajiban membayar pajak.

Demikian disampaikan Kepala Bapenda Kota Baubau Hj Wa Raja, SE. Menurut Wa Raja, pajak ini wajib dan tidak sama dengan retribusi sebab kalau retribusi harus ada fasilitas yang disiapkan baru menuntut untuk dibayarkan. Akan

tetapi, pajak adalah kewajiban seorang wajib pajak untuk menyelesaikannya.

Wa Raja berharap, agar masyarakat selaku wajib pajak menyadari kewajibannya. Kemudian, kalau PBB (pajak bumi dan bangunan) jelas bahwa ada ketetapan tetap yang tidak punya ketetapan seperti pajak hotel, pajak restoran dan ini ketentuannya sesuai omset. Hanya saja, kadangkala wajib pajak melaporkan tidak sesuai dengan omset yang didapat, oleh Bapenda sampai saat ini masih dilakukan pendekatan persuasif.

"Kami selalu secara langsung harus menyadarkan mereka bahwa itu adalah kewajiban mereka bukan paksaan tetapi kewajiban yang harus mereka selesaikan," ujarnya.

Sementara itu, untuk realisasi pajak dan retribusi yang dikelola Bapenda Kota Baubau di tahun 2023, Wa Raja menjelaskan, sudah mencapai kurang lebih 93 persen atau Rp 38 milyar lebih. Dan untuk retribusi berasal dari penjual di pantai kamali, kota mara dan pasar buah. (*)

Pj Walikota Baubau Dr Muh Rasman Manafi Fungsikan Bangsal Pasca Panen Tanganapada

untuk memastikan semua mendapat kesempatan dan bisa berbuat untuk negeri ini.

Bangsal pasca panen dan pengolahan hasil hortikultura ini bagian dari Kota Baubau karena semua wilayah kota itu tingkat kesejahteraan, tingkat pengetahuan, tingkat informasi yang di

peroleh termasuk wawasan yang di miliki itu berbeda dengan Kabupaten. Sektor jasa yang menentukan itu ada dua yaitu kemampuan sumber daya manusia dan konektifitas

"Hari ini ada bangsal yang sudah di siapkan oleh pemerintah saya kira pemerintah sebelumnya sudah menyiapkan

kan bangsal ini, sekarang saatnya ayo kita kerjakan bersama fungsikan bangsal ini untuk meningkatkan pengolahan kita mendapatkan manfaat supaya sekitar kita dapat

bermanfaat,"katanya.

Ditambahkan, kalau di setiap wilayah Kota Baubau berpola seperti ini dengan kemampuan yang ada maka secara portal nanti akumulasi kota bisa ditangani dan daya beli masyarakat bisa meningkat. Namun demikian, tidak akan sampai tujuan jika tidak melangkah "Mohon kiranya optimalkan, manfaatkan sehingga bisa meningkatkan hidup kita, keluarga kita dan bisa meningkatkan ekonomi kita,"tutupnya. (*)

Ketua TP PKK Baubau Optimis Organisasi Wanita Lebih Baik Ke Depan

isasi wanita se-kota Baubau dalam 2 (dua) bulan terakhir ini menunjukkan bahwa bermitra, bergerak dan bekerja bersama adalah sebuah pilihan dan komitmen nyata yang jika dikerjakan sepenuh hati, maka hasilnya pasti akan jauh lebih baik. Dan ini telah dilakoni oleh TP PKK Baubau bersama pemerintah sebagai mitra strategis dan PKK dengan organisasi wanita lainnya sebagai mitra juangnya.

"Bekerja bersama, seperti semangat yang selama ini digaungkan oleh Pemkot Baubau, hari ini ditunjukkan secara nyata oleh seluruh organisasi wanita, mulai dari akar rumput, hingga pada pengambilan kebijakan. organisasi wanita yang beragam latar belakang, suku, agama dan tu-

juannya, namun dipersatukan oleh sebuah tujuan besar, bahwa percepatan penurunan stunting, pengendalian inflasi dan pengentasan kemiskinan ekstrim adalah tantangan bersama. tantangan yang hanya bisa di jawab dengan bekerja bersama, bukan kerja sendiri-sendiri apalagi bersikap apatis,"ujar ibu Refiani Dwiatmo Rasman

Ditambahkan, saat ini adalah puncak peringatan hari ibu ke-95 dan hari ulang tahun dharma wanita ke-24. Sebelum sampai pada titik ini, berbagai rangkaian kegiatan telah dilakukan sebagai bukti aksi nyata bahwa pkk ikut berkontribusi dalam pembangunan di Kota Baubau. Keterlibatan PKK dan organisasi wanita lainnya dalam upaya

revitalisasi Pokjanel Posyandu sebagai salah satu upaya percepatan penurunan stunting misalnya, menempatkan PKK sebagai penggerak di akar rumput, memastikan setiap ibu, bayi, balita, anak, remaja, dewasa dan lansia sehat fisik dan mentalnya, tangguh keluarganya, sehat lingkungan sekolah, rumah dan sosialnya, dan terpenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan sebagai dua kebutuhan dasar PKK ikut serta mengintensifkan posyandu dan rumah pemulihan gizi bekerja bersama lintas sektor. juga, melaksanakan semua kegiatan yang berujung terciptanya kesehatan masyarakat.

Kemudian, PKK bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan workshop bagi tim pendamping keluarga sebagai garda terdepan dalam upaya intervensi sensitif penguatan peran keluarga dalam percepatan penurunan stunting, berupa edukasi akan pentingnya peran dan dukungan keluarga dalam memastikan ibu dan bayi balita tumbuh sehat secara mental spiritual

Selain itu, PKK juga bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menginisiasi gerakan tanam cabai (gertam cabai) sebagai upaya pengendalian inflasi pada skala kecil, yakni keluarga dengan memenuhi kebutuhan rumah tangganya sendiri. seperti pepatah bijak mengatakan, "it's not big thing, but

PUPR kabupaten Buton Utara.

Suarsanto menjelaskan dalam realisasi belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang disajikan pada LRA tahun 2022 terdapat realisasi senilai Rp.153.378.169.264,00 pada dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Buton Utara.

Kata Santo berdasarkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Buton Utara tahun anggaran 2022 di Buranga dengan nomor: 27.B/LHP/XIX. KDR 05/2023 tanggal 15 Mei 2023 terdapat kekurangan volume pada 10 paket pekerjaan peningkatan jalan di kabupaten Buton Utara.

Santo mengungkapkan, hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap dokumen pertanggung jawaban dan pemeriksaan fisik lapangan menunjukkan temuan LHP BPK perwakilan provinsi Sulawesi Tenggara atas kekurangan volume pada 10 paket Pekerjaan Peningkatan jalan tersebut.

"Diantaranya pekerjaan peningkatan jalan Kecamatan Kulisusu Barat, pekerjaan peningkatan jalan Kulisusu Utara, pekerjaan peningkatan jalan kecamatan Kulisusu, pekerjaan peningkatan jalan kecamatan kambowa, pekerjaan peningkatan jalan Desa Waode Angkalo

remember, you make big things out of little things sometimes", yang artinya, ini mungkin upaya yang kecil, tapi ingatlah, hal besar berasal dari hal yang kecil.

Beberapa hari lalu, gabungan organisasi wanita melakukan ziarah taman makam pahlawan oputa yi koo sebagai bentuk penghormatan dan terima kasih atas jasa para pahlawan yang telah

mengorbankan harta, jiwa dan raganya dalam memperjuangkan kemerdekaan yang sekarang kita nikmati bersama dilanjutkan dengan bakti sosial sebagai bentuk kontribusi dan kepedulian seluruh organisasi wanita akan pengentasan kemiskinan ekstrim.

"Seluruh upaya dan kontribusi yang dilakukan mungkin belum optimal, namun saya percaya, kita su-

kecamatan Bonegunu, pekerjaan peningkatan jalan kecamatan Kulisusu Utara dan pekerjaan pembangunan jaringan irigasi D.I Lambale tahap IV, " tulis Santo dalam press releasenya, malam Rabu (09/01/2024).

Lebih lanjut Santo mengatakan pekerjaan pada 10 paket tersebut telah dinyatakan selesai 100 persen oleh PPK berdasarkan berita acara serah terima pertama dan telah dibayar lunas serta perhitungan bersama dengan PPK, PPTK, kontraktor pelaksana, dan konsultan pengawas yang didampingi oleh Inspektorat.

Namun berdasarkan temuan BPK perwakilan provinsi Sulawesi Tenggara diketahui bahwa terdapat kekurangan volume kurang lebih Rp.1.753.627.550,00.

"Kondisi tersebut tidak sesuai dengan peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden no 12 tahun 2021 dan UU nomor 31 tahun 1999 juncto No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, " tutup Santo.

Hingga berita ini diterbitkan, media ini belum bisa menghubungi Kepala Dinas PUPR Buton Utara, Mahmud Buburanda untuk dimintai tanggapannya. (*)

dah berada di jalur yang tepat, sejalan dengan tema peringatan hari ibu ke-95 tahun 2023 yaitu: "perempuan berdaya, indonesia maju" yang berarti panggilan untuk memahami dan menghargai kontribusi yang signifikan yang diberikan oleh perempuan dalam memajukan daerah ini sekecil apapun itu,"tutupnya. (*)

Jatuh Bangun PDIP, Dikebiri Orba hingga Incar Hattrick Menang Pemilu



Megawati Sukarno Putri

Laporan: Hasim

JAKARTA, BP-- Usia Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menginjak 51 tahun pada Rabu (10/1).

Hari Ulang Tahun PDIP kali ini mengusung tema 'Satyam Eva Jayate' yang berarti kebenaran pasti menang.

Perayaan digelar dengan sederhana dan hanya mengundang 51 orang undangan tamu VVIP di sekolah partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

Sejarah terbentuknya PDIP sangat dinamis. Jika ditelusuri secara historis, cikal bakal terbentuknya partai ini harus dilihat dari kemunculan Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan Sukarno pada 4 Juli 1927.

Wapres Ma'ruf Amin Acungkan Salam Metal 3 Jari di HUT ke-51 PDIP

Dalam perjalanannya, PNI dilebur dengan sejumlah partai lain yaitu Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Partai Murba), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik. Peleburan itu tak lepas dari aturan fusi partai yang dibuat Presiden kedua RI Soeharto.

Gabungan PNI-Murba-IPKI-Parkindo-Partai Katolik itu menamakan diri sebagai Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang dideklarasikan pada 10 Januari 1973. PDI menggelar musyawarah nasional (munas) pertama pada 20-24 September 1973 di Jakarta.

Munas itu tak membuah hasil yang signifikan. Sementara itu, dinamika internal partai diwarnai konflik dan intervensi dari pemerintah.

Atas situasi yang tidak kondusif itu, Megawati Soekarnoputri yang juga

anak Sukarno pun didorong untuk menjadi Ketua Umum PDI. Harapannya, permasalahan di tubuh PDI tidak berlarut.

Tak Diundang HUT PDIP, Ini Momen Terakhir Jokowi Bersama Megawati

Hendak dikebiri Orde Baru

Dikutip dari laman resmi PDIP, upaya menjadikan Megawati sebagai ketua umum PDI tidak berjalan lancar. Sebab, pemerintahan Soeharto tidak setuju.

Penguasa Orde Baru itu bahkan menerbitkan larangan mendukung pencalonan Megawati dalam Kongres Luar Biasa (KLB) pada 2-6 Desember 1993 di Asrama Haji Sukulilo, Surabaya, Jawa Timur.

Konflik internal PDIP pun tak kunjung mereda. Menjelang KLB ke-2 di Asrama Haji Medan, para pendukung Megawati melakukan unjuk rasa hingga bentrok dengan aparat keamanan yang menjaga kongres.

Unjuk rasa itu terjadi pada 20 Juni 1996 atau dua hari sebelum kongres dihelat.

Namun, unjuk rasa itu tak menghentikan pemerintah Orba untuk 'mengebiri' PDI. Pada 15 Juli 1996, Soeharto mengukuhkan Suryadi sebagai Ketua DPP PDIP.

Megawati Jelaskan Filosofi Akar Rumput saat Hadapi Rezim Otoriter

Pada 27 Juli 1996, pendukung Megawati pun menggelar Mimar Demokrasi di halaman kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro Nomor 58, Jakarta Pusat.

Saat orasi berlangsung, muncul rombongan berkaus merah dari kubu Suryadi. Bentrok rombongan yang diduduki sebagai kubu Suryadi dengan Megawati pun tak terelakan.

Peristiwa itu berlangsung sengit hingga menelan korban jiwa.

Hasil penyelidikan Komnas HAM menyebutkan ada lima orang tewas, 149 orang luka, dan 23 orang hilang. Adapun kerugian materiil diperkirakan mencapai Rp 100 miliar akibat dari peristiwa kudatuli ini.

Peristiwa tersebut dikenal dengan Tragedi Dua Puluh Tujuh Juli atau disingkat menjadi Peristiwa Kudatuli.

Meski demikian, hingga saat ini peristiwa tersebut belum ditetapkan sebagai pelanggaran HAM berat. Pengusutannya pun belum tuntas.

Tahun 1998 rezim Soeharto dilengserkan. Momen ini jadi awal kebangkitan PDI di bawah Megawati. Sebab pembatasan terhadap Megawati telah dihapus.

Megawati akhirnya ditetapkan sebagai ketua DPP PDIP periode 1998-2003 pada Kongres ke-V di Denpasar, Bali.

Mega yang merupakan putri Presiden pertama dan proklamator RI Sukarno itu kemudian mengubah nama PDI menjadi PDI Perjuangan (PDIP) pada 1 Februari 1999 dan dideklarasikan pada 14 Februari 1999 di Istora Senayan, Jakarta. Perubahan nama dilakukan salah satunya agar dapat mengikuti pemilu.

Kongres I PDIP digelar di Hotel Patra Jasa, Semarang, Jawa Tengah pada 27 Maret-1 April 2000. Kongres tersebut menghasilkan keputusan Megawati Sukarnoputri sebagai Ketua DPP PDIP periode 2000-2005.

Kemudian, pada Kongres IV PDIP di Bali pada 8-12 April 2015, Megawati kembali dikukuhkan sebagai Ketua PDIP periode 2015-2020.

Masa jaya hingga pimpin negara

Masa kejayaan PDIP memang terjadi pasca rezim Orba runtuh.

Hari ke Empat, KPU Baubau Selesaikan Pelipatan Surat Suara DPR RI



Ketua Bawaslu, Sarmin SPd kiri dan Ketua KPU Baubau kanan, di gudang penyortiran dan pelipatan surat suara pemilu 2024

Pewartu: Alyakin

BAUBAU, BP - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Baubau mulai melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara pemilu 2024, di sebuah gudang tepatnya di Jl. Sultan Dayanu Ikhsanuddin, Kecamatan Betoambari Kota Baubau. Selasa (09/01/2024). Kegiatan tersebut melibatkan 100 warga kota Baubau.

"Sejak Sabtu, sudah empat hari kami melakukan pelipatan surat suara. Surat suara DPR RI yang sudah diselesaikan. Sekarang ini pelipatan surat suara DPRD Provinsi," ungkap Ketua KPU Baubau, La Ode Supardi ketika ditemui di sela-sela kegiatan di gudang Logistik KPU Baubau.

La Ode Supardi mengatakan, penyortiran dan pelipatan surat suara pemilu 2024 sebanyak 110,790 dengan melayani pemilih sebanyak 108,435. Pelipatan ini ditergetkan 10 hari selesai (Tuntas-Red). Sedangkan

Tahun 1999-2001, Megawati menjadi wakil presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

Megawati bahkan naik menjadi presiden pada pertengahan 2001. Megawati ditunjuk sebagai presiden setelah MPR pada 23 Juli 2001.

Namun, pada Pemilu 2004 dan 2009 Megawati kalah bersaing dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Meski demikian PDIP kembali menjadi partai penguasa pada 2014. Pada Pemilu

perakitan kotak suara telah di selesaikan sebanyak 2261.

"Alhamdulillah, dalam proses pelipatan surat suara, untuk saat ini belum ada masalah," katanya.

Disamping itu, sebelum melakukan kegiatan pelipatan surat suara Pilpres, DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, DPRD Kab/Kota, mereka terutama dibriefing, dibimbing, diberikararahan oleh KPU Baubau serta Bawaslu Baubau agar dalam proses tidak terjadi kesalahan.

"ya pasti kita berikan simulasi atau tata cara pelipatan surat suara, dan itu diawasi langsung dari

Bawaslu baubau. Sebagian dari mereka sudah memiliki pengalaman melipat surat suara karena sebelumnya dipekerjakan oleh KPU Baubau pada pemilihan sebelumnya," katanya.

Ditempat yang sama, ketua Bawaslu Baubau, sarmin S.pd mengatakan, selama proses penyortiran dan pelipatan surat suara pemilu tidak ditemukan masalah atau kendala. Semuanya berjalan dengan baik, aman dan lancar.

"Sampai hari ini tidak ada hal yang berpotensi bermasalah dalam proses pelipatan surat suara, atau menemukan surat suara yang tidak

buming Raka.

Gibran bahkan maju menjadi cawapres dari rival paslon usungan PDIP. Gibran maju bersama Prabowo Subianto usai keluar putusan MK terkait perubahan syarat usia capres-cawapres.

MK mengabulkan gugatan batas usia capres-cawapres minimal 40 tahun atau menduduki jabatan yang dipilih dari pemilu/pilkada pada 16 Oktober 2023. Imbas putusan ini, Gibran diperbolehkan maju sebagai cawapres

memenuhi ketentuan peraturan KPU (PKPU)," katanya.

Penyortiran dan pelipatan surat suara pemilu 2024 sangat fundamental. Olehnya itu, pihaknya berharap kepada KPU Baubau agar melaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga tidak menjadi penghambat pada tahapan Pemilu.

"Kami harap kepada KPU agar dapat memastikan semua personil yang bertugas melipat surat suara dengan baik, tertib, cermat dan berhati-hati" katanya.

Informasi tambahan, penyortiran dan pelipatan surat suara pemilu 2024 dimulai pada pukul 08.00 wita - 22.00 wita. Pelaksanaan kegiatan ini dikawal ketat oleh anggota polres Baubau serta diawasi Bawaslu Baubau. (*)

meski usianya baru menginjak 36 tahun.

Jokowi juga santer dikabarkan memberikan dukungannya kepada Prabowo sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang. Hal ini pun beriringan dengan organisasi relawan Projo yang mendukung Prabowo.

Meski demikian, PDIP mengaku tetap solid dan fokus untuk menang yang ketiga kalinya secara berturut-turut (hattrick) pada Pemilu 2024) (*)

Begini Pesan Sekda Sultra kepada Massa Aksi Demonstasi Terkait Rekrutmen Pegawai Honorer RS Jantung, Pembuluh Darah dan Otak Oputa Yi Koo



Pewarta: Lisna

KENDARI - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Drs H Asrun Lio MHum PhD, Sealasa (9/1), akhirnya meluruskan informasi yang selama ini berkembang, utamanya terkait polemik rekrutmen tenaga Tenaga Honorer di Rumah Sakit Jantung, Pembuluh Darah dan Otak Oputa Yi Koo, yang kemudian berujung pada aksi demo di Kantor BKD Sultra hingga berakhir ricuh, Senin (8/1).

Terkait kejadian tersebut, Jenderal ASN Provinsi Sultra meminta kepada semua pihak untuk tetap dapat menahan diri, agar permasalahan rekrutmen tenaga honorer, tidak sampai merembes bahkan membuka persoalan baru, terlebih hingga akhirnya menimbulkan insiden antara massa aksi demonstrasi dengan aparat Sat Pol PP Provinsi Sultra.

Sebelum memberikan penjelasan lebih rinci terkait kronologis rekrutmen tenaga honorer RS Jantung, Pembuluh Darah, dan Otak Oputa Yi Koo, Sekda Sultra ini tidak lupa mengungkapkan rasa empati serta permohonan maaf atas peristiwa yang menimpa massa aksi demo di Kantor BKD Provinsi Sultra.

Berangkat dari seorang akademisi, Asrun Lio memahami betul bagaimana kondisi psikologis massa aksi, dimana sebagian kecil diantaranya, mungkin melibatkan gerakan mahasiswa, yang tidak lain adalah anak didik, sehingga naluri orang tua sebagai dosen, tak

bisa terelakkan pada diri Jenderal ASN Provinsi Sultra ini, serta sebagai pimpinan yang memiliki tanggung jawab terhadap bawahannya.

Adapun peristiwa tersebut dilaporkan kepada pihak berwajib, bagi Sekda Sultra ini, hal tersebut merupakan hal yang lumrah, sebagai upaya dari massa aksi demo dalam mencari keadilan, sekaligus momen bagi pemerintah, dalam hal ini Sat Pol PP Sultra untuk lebih memperbaiki diri dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, utamanya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Usai mengungkapkan rasa empati dan simpati atas aksi demo yang berujung ricuh, Sekda Sultra ini juga menuturkan, jika penjelasan yang akan diberikannya terkait rekrutmen tenaga honorer RS Jantung, Pembuluh Darah, dan Otak Oputa Yi Koo pada Tahun 2023 lalu hingga munculnya polemik 413 pelamar, bukan dalam rangka mencari kesalahan salah satu pihak, melainkan dalam rangka meluruskan informasi yang selama ini berkembang miring, dengan tetap mengedepankan duduk bersama untuk mencari solusi terbaik. Terlebih dirinya selaku Sekda Sultra telah mengambil sejumlah langkah konkret, dalam menangani persoalan dimaksud, tanpa memberikan penjelasan kepada publik, karena adanya sejumlah pertimbangan penting.

Asrun Lio mengungkapkan, jika dalam rekrutmen pegawai honorer RS Jantung, Pembuluh Darah, dan Otak Oputa Yi Koo harus tetap berlandas-

kan UU yang berlaku, dengan tetap memikirkan nasib para pencari kerja.

“Untuk diketahui, rekrutmen pegawai honorer RS ini diawali dengan pembentukan panitia. Kemudian, ketua panitia melakukan seleksi penerimaan pegawai honorer, guna mengisi 36 formasi jabatan untuk 187 Tenaga Tenaga Non ASN pada Rumah Sakit Jantung, Pembuluh Darah dan Otak Oputa Yi Koo Pemerintah Provinsi Sultra. Setelah itu, ketua panitia mengeluarkan surat pengumuman tentang Kelulusan Peserta Seleksi Computer Assisted Test (CAT,red) sebanyak 187 orang yang dinyatakan lulus, untuk kemudian diangkat menjadi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara RS tahun 2023 dan penggajiannya telah dianggarkan pada DPA Dinas Kesehatan Sultra Tahun Anggaran 2023,” papar Asrun Lio.

Dia melanjutkan, sehubungan hal tersebut maka telah dilaksanakan rekrutmen Tenaga Non ASN pada Rumah Sakit Jantung Pembuluh Darah dan Otak Oputa Yi Koo Provinsi Sultra, untuk mengisi formasi sebanyak 187 orang sesuai dengan pengumuman yang dikeluarkan oleh Panitia Seleksi (Pansel).

Sekda Sultra ini juga mengungkapkan, jadi adanya tambahan formasi atau yang disebut formasi tambahan hingga kini mencapai 413, tanpa melalui panitia ataupun ketua panitia seleksi. Meskipun demikian, pihaknya akan tetap mencari solusi terbaik, serta melakukan pemeriksaan terhadap 413 pelamar yang dimaksud.

Berikut Laporan Singkatnya :

1. Rujukan Rekrutmen Tenaga Honorer : a. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 800/761 Tahun 2023

tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Tenaga Honorer Rumah Sakit

Jantung, Pembuluh Darah dan Otak Oputa Yi Koo Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, yang masih mengacu pada Undang-Undang Nomor: 5

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara b. Surat Ketua Panitia Nomor : 800/449 Tahun 2023 Tentang Seleksi

Penerimaan Tenaga Honorer di Rumah Sakit Jantung, Pembuluh Darah dan Otak Oputa Yi Koo Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2023 untuk mengisi 36 Formasi jabatan untuk 187 Tenaga

Tenaga Non ASN pada Rumah Sakit Jantung, Pembuluh Darah dan Otak Oputa Yi Koo Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, c. Surat Ketua Panitia Seleksi dengan Surat Pengumuman Nomor :

800.1.2.3/2010 tanggal 6 April 2023 tentang Kelulusan Peserta Seleksi

Computer Assisted Test (CAT) Penerimaan Tenaga Honorer Rumah Sakit Jantung, Pembuluh Darah dan Otak Oputa Yi Koo Prov. Sultra sebanyak

187 orang yang dinyatakan lulus; d. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 512 Tahun 2023

Tentang Pengangkatan Pegawai Non

Kunjungan Menteri Pertanian di Kabupaten Konawe Utara Didampingi Sekda Sultra Asrun Lio

Pewarta: Mashuri

Andowia, 10 Januari 2024

Tepat pukul 08.00 Wita, Helikopter yang ditumpangi Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, mendarat di pelantaran Kantor Bupati Konawe Utara. Didampingi Sekda Prov. Sultra dan Danrem 143 HO, Amran Sulaiman turun dari Heli dan disambut Bupati Konawe Utara, Ruksamin, Danlanud Kendari, jajaran eselon 1 Kementerian Pertanian RI, sejumlah Kepala OPD lingkup Pemprov (Kadis Pertanian dan Kadis Kominfo). Sebelum ke tempat kegiatan rombongan sarapan pagi di Rumah Jabatan Bupati Konawe Utara.

Kehadiran Amran Sulaiman di Bumi Konasara, dalam rangka :

1. penanaman Jagung dan Padi
2. Penyerahan bantuan benih/bibit komoditas pertanian
3. Pembinaan penyuluh dan petani

Aparatur Sipil Negara Rumah Sakit

Jantung, Pembuluh Darah dan Otak Oputa Yi Koo provinsi Sulawesi

Tenggara tahun 2023 tanggal, 30 Agustus Tahun 2023; Berdasarkan hasil

seleksi Tenaga non-ASN sesuai Formasi sebanyak 187 Orang dan

penggajiannya telah dianggarkan pada DPA Dinas Kesehatan Provinsi

Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2023. 2. Tindaklanjut :

a. Telah dilaksanakan rekrutmen Tenaga Non ASN pada Rumah Sakit

Jantung Pembuluh Darah dan Otak Oputa Yi Koo Provinsi Sulawesi

Tenggara untuk mengisi formasi sebanyak 187 orang sesuai dengan

pengumuman yang dikeluarkan oleh Panitia Seleksi (Pansel).

3. Asal Mula Polemik 413 Orang Pendaftar

a. Secara sepihak Direktur Rumah Sakit Jantung Pembuluh

Daerah dan Otak Oputa Yi Koo Provin-



konawe utara

Untuk lebih jelasnya berikut rundown kegiatan yang rencananya diadakan 2 hari di Kabupaten Konawe Utara, 10 Januari 2024 dan Kabupaten Konawe, 11 Januari 2024 :

Kunjungan Hari Pertama di Kabupaten Konawe Utara ;

08.50 sd 11.00 penanaman Jagung bersama dan pembinaan petani

12.30 sd 14.45 rapat internal

15.00 sd 15.30 menuju kendari un-

tuk beristirahat di Claro Hotel

Kunjungan Hari Kedua di Kabupaten Konawe :

08.00 perjalanan menuju Desa Waworada Kabupaten Konawe

08.00 sd 09.00 penanaman padi bersama

09.20 sd 11.00 pembinaan petani dan penyuluh pertanian wilayah sultra.

12.30 menuju Makassar melalui Bandara Haluoleo Kendari(*)

Oktober 2023 Perihal Permintaan

SK Non ASN Formasi 413) dan Surat Nomor : 445/797-

RSJPDO/VIII/2023 Tanggal 22 Agustus 2023 Perihal Permintaan Hasil

Seleksi CAT Tenaga Kontrak Formasi 413) ;

c. Terkait dengan Permintaan SK. Non ASN ini Komisi IV DPRD menerbitkan

Surat Nomor: 400.14.16/159 Tanggal 11 Desember 2023 Perihal Rapat

Dengar Pendapat dengan meminta kepada Pimpinan dan Anggota Komisi

I dan IV DPRD Prov. Sultra, Kepala BKD Prov. Sultra dan Plt. Direktur

Rumah Sakit Jantung Pembuluh Darah dan Otak Oputa Yi Koo Provinsi

Sulawesi Tenggara dan Koordinator Tenaga Formasi P2 Perwakilan Calon

Tenaga Honorer Non-ASN yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember

2023 diruang Aspirasi Sekretariat DPRD. (*)

Tim Pengendalian Inflasi Daerah Buton Sidak Pasar



Pewarta: Rahman

BUTON, BP-Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buton Asnawi Jamaluddin, S.Pd., M.Si. yang juga Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Buton memimpin langsung Sidak Pasar bersama OPD terkait dan anggota TPID Kabupaten Buton. Sidak dilakukan di dua pasar di ibujota Kabupaten Buton, Pasar Kaloko, dan Pasar Shabo, Kecamatan Pasarwajo, Rabu, 10 Januari 2024.

Sidak Pasar dilakukan guna meninjau langsung 3 komoditi yang menyebabkan kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Buton hingga mencapai 3,31 yaitu ikan kembung, cabai, dan bawang merah.

Dimulai dari Pasar Kaloko yang terletak di Kelurahan Takimpo kemudian dilanjutkan ke Pasar Sabho di Kelurahan Saragi.

Setelah meninjau kedua Pasar tersebut Sekda bersama anggota TPID mengada-

kan pertemuan dengan pihak BPS Kabupaten Buton.

Pada pertemuan itu kembali dibahas mengenai Langkah-langkah yang akan ditempuh Pemkab Buton untuk mengendalikan harga komoditi yang mengalami peningkatan.

“Pemerintah harus melakukan intervensi terhadap komoditi yang mengalami kenaikan harga IPH utamanya beras dan cabai,” kata Sekda Buton.

Jenderal ASN ini pun menegaskan pada Instansi terkait untuk melakukan langkah-langkah guna mengantisipasi lonjakan harga di pasar.

“Jadi salah satunya Langkah adalah perbanyak RPK di seluruh wilayah Kabupaten Buton,” katanya.

Rapat kembali digelar sore hari di Aula Kantor Bupati Buton di Takawa. “Kita lakukan adalah penambahan RPK (Rumah Pangan Kita) di seluruh daerah terutama di Ibu Kota Pas-

arwajo, sehingga kita berikan kesempatan siapa saja yang mau membuka usaha agar harga beras bisa stabil, karena ikan kembung saat ini memang belum musimnya. Untuk menanam kita sekarang juga semua bergerak, namun itu jangka panjang. Kita tanam sekarang panennya masih lama, sementara IPH ini setiap minggu di evaluasi,” jelasnya.

Kepala BPS Zablin, S.ST. mengungkapkan memang di pasar ada komoditi memang mengalami kenaikan harga. Tetapi ada harga-harga yang bisa diintervensi dalam jangka pendek ada juga yang panjang.

“Di kita ini yang bisa diintervensi dan tersedia penyalurannya adalah beras.

Mudah-mudahan dengan menciptakan pelaku baru, harga beras dapat terkendali. Karena beras merupakan komoditas yang konsumsinya sangat berpengaruh terhadap komoditi yang lain,” ungkapnya. (*)

Pemkab Buton Gelar Rapat Tindak Lanjut Tanda Tangan Elektronik



Pewarta: Rahman

BUTON, BP-Pemkab Buton melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Buton menggelar Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) di Aula Kantor Bupati Buton, Takawa, Rabu, 10 Desember 2024.

Pertemuan tersebut dipimpin langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buton, Asnawi Jamaluddin, SPd, MSi, didampingi Asisten Administrasi Tata Pemerintahan dan Kesra Sekda Buton, Alimani, S.Sos, Plt Kadis Kominfo dan Persandian Kabupaten Buton, Alimuddin Matu, SPd, MSi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buton, Asnawi Jamaluddin, SPd, MSi dalam arahannya menyampaikan

semua data ASN Pemerintah Kabupaten Buton, melalui Dinas Kominfo untuk segera diproses untuk pembuatan email resmi pemerintah sebagai data usul pembuatan akun pengguna sertifikat Tanda Tangan Elektronik untuk para ASN di Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton.

“Jadi untuk melakukan penantangan dokumen kita tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan tanda tangan peja-

bat terkait. Cukup menggunakan tanda tangan elektronik berbarcode. Dengan TTE maka tanda tangan tidak bisa dipalsukan,” kata Sekda.

“Semisal saya sedang ada rapat di luar daerah, maka permintaan tanda tangan tidak perlu menunggu saya pulang. Cukup saya cek dari gadget yang saya punya untuk penantanganannya. Sehingga yang tertera di dokumen nanti bukan lagi tanda tan-

gan manual, namun berupa barcode yang menyimpan data tanda tangan,” lanjut Sekda.

Sekda juga menegaskan, TTE bakal diberlakukan setelah launching sambil menunggu regulasi TTE tersebut rampung.

Pemaparan mekanisme pembuatan TTE dipaparkan Kepala Bidang Persandian, Diskominfo dan Persandian Kabupaten Buton, Sam-suddin, SSos, MSi.

Rapat tersebut diikuti Kepala OPD, Asisten, Staf Ahli, Kepala Bagian, dan Sekuruh Camat di Lingkup pemkab Buton. (*)

Pj. Bupati Buton terima CSR Bank Sultra Bidang Sanitasi



Pewarta: Rahman

BUTON, BP-Pj. Bupati Buton, Drs. La Ode Mustari, MSi menirma CSR Bank Sultra Bidang sanitasi. Bantuan tersebut diserahkan Pimpinan Cabang Bank Sultra Pasarwajo, Syahrul Hidayat sebesar Rp 100 juta.

Pj. Bupati Buton pada acara tersebut didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Buton, Asnawi Jamaluddin, Spd, MSi, Ketua DWP Kabupaten Buton, dan juga pimpinan Bank Sultra Takawa, Ny Kiki Amalia Asnawi dipusatkan di Aula Kantor Bupati Bu-

ton, Pasarwajo, Senin 8 Januari 2024.

Komitmen Bank Sultra untuk mendukung program pemerintah daerah dalam rangka menyejahterakan masyarakat kembali dibuktikan melalui penyerahan secara simbolis dana Corporate Social Responsibility (CSR). (*)

Anggota Komite I DPD RI Kunker di Buton



Pewarta: Rahman

BUTON, BP-Anggota DPD RI yang tergabung dalam Komisi I, Andi Nirwana Sebbu SP., MM, melakukan lawatan Kunjungan kerja di kabupaten Buton. Kunker legislator senayan itu diterima Asisten Administrasi Tata Pemerintahan dan Kesra Sekda Buton, Alimani, S.Sos, mewakili Pj. Bupati Bu-

ton di di Aula Kantor Bupati Buton, Rabu, 10 Januari 2024

Agenda Kunker tersebut terkait pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah dan kendala yang dialami selama berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Kegiatan tersebut diikuti Kepala OPD, Kabag, Camat di Lingkup Pemkab

Buton.

“Sebenarnya agenda ini dilaksanakan di Provinsi Bali dan Sulawesi Utara tapi karena kita berada menjelang masa-masa pemilu sehingga kami diperintahkan untuk kembali ke Dapil masing-masing,” tuturnya.

Andi Nirwana mengatakan sebagai mitra pemerintah daerah dalam Kunkernya hari ini dalam rangka pengawasan Undang-

undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

“Karena saya ini adalah selaku jembatan aspirasi masyarakat dan juga Pemerintah Daerah tentunya saya ingin mendengar mengenai keluhan apa yang kita hadapi selama menjalankan roda pemerintahan karena ini tugas saya untuk melakukan pengawasan,” katanya. (*)

Kunjungan Kerja di Kota Palu, Menkes Tinjau Kelengkapan Fasilitas Layanan Kesehatan di Puskesmas dan RSUD



Laporan: Noval

PALU-Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin didampingi Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, dr. Maria Endang Sumiwi melakukan kunjungan kerja di Kota Palu, Sulawesi Tengah pada Sabtu (6/1/2024).

Dalam kunjungannya, Menkes Budi bersama rombongan meninjau kelengkapan fasilitas pelayanan dan alat kesehatan yang ada di Puskesmas Bulili dan RSUD Undata Kota Palu. Puskesmas sebagai pusat layanan kesehatan masyarakat tingkat pertama turut menjadi ujung tombak untuk menjaga masyarakat tetap sehat.

Pada agenda kunjungan kali ini, Menkes Budi ingin meninjau secara langsung kelengkapan fasilitas pelayanan yang ada di Puskesmas Bulili. Fasilitas pelayanan itu, di antaranya Pelayanan Kesehatan Umum, USG dan Antropometri di Ruang Perawatan Ibu dan Anak, ketersediaan tempat tidur di Ruang Bersalin, kelengkapan alat

pemeriksaan darah di laboratorium, dan ruang pelayanan kesehatan gigi dan mulut, serta akses pelayanan gawat darurat.

Menkes Budi mengapresiasi upaya Dinas Kesehatan Kota Palu dalam mendukung Puskesmas Bulili menyediakan pelayanan prima untuk masyarakat, salah satunya terhadap Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut.

"Ini hebat dinkesnya bisa bantu disediakan alat dan bahan habis pakai untuk tindakan penambalan gigi berlubang karena jarang Puskesmas yang bisa. Biasanya, hanya pembersihan karang gigi dan pencabutan. Jadi, masyarakat nggak perlu khawatir berobat di sini. Kalau ada gigi bolong, bisa ditambal, bukannya langsung dicabut, ya," ujar Menkes Budi

Dalam kunjungan singkat tersebut, Menkes Budi bersama Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat dr. Maria Endang Sumiwi turut meninjau data cakupan program yang berjalan serta memastikan ketersediaan alat dan

fasilitas yang ada di Puskesmas Bulili, termasuk kelengkapan Imunisasi Dasar dan layanan Skrining Hipotiroid Kongenital.

Sebelum meninggalkan Puskesmas Bulili, Menkes Budi berpesan kepada para petugas dan tenaga kesehatan di sana untuk terus berupaya melakukan peningkatan mutu layanan kesehatan yang ada di Puskesmas Bulili, Palu.

Selanjutnya, Menkes Budi beserta rombongan melanjutkan agenda kunjungan ke RSUD Undata Kota Palu. Saat ini, RSUD Undata memiliki beberapa layanan unggulan di antaranya Layanan Onkologi, Ginekologi, Pelayanan Bedah Jantung, Bedah Saraf, Pelayanan Ginjal dan Hipertensi, serta Bedah Urologi ESWL (Tembak Batu Ginjal).

Sebagai Rumah Sakit Rujukan Nasional, Menkes Budi ingin memastikan seluruh aspek layanan mulai dari ketersediaan alat kesehatan, kelayakan fasilitas, hingga kebutuhan SDM kesehatan terpenuhi dengan baik. Sehingga, pasien yang datang berobat dapat ditangani hingga tun-

tas di RSUD Undata Kota Palu tanpa perlu dirujuk lagi ke luar provinsi.

"Saya harap masyarakat Palu yang mengidap penyakit stroke, kanker, ginjal kalo bisa nggak perlu dirujuk sampai ke Makassar. Upayakan selesaikan pengobatannya cukup sampai di RSUD Undata saja supaya tidak menyulitkan pasien," kata Menkes Budi

Menkes Budi menilai ketersediaan SDM Kesehatan di RSUD Undata sudah cukup memadai, tetapi jumlah dokter spesialis tetap perlu diperbanyak. Selain itu, RSUD Undata perlu menambah kompetensi para perawatnya supaya dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Kota Palu.

"Kalau saya lihat di sini dokter dan perawatnya sudah ada, tinggal jumlah dokter spesialisnya diperbanyak, dan para perawatnya diberi pelatihan kompetensi tambahan, supaya dapat melayani masyarakat dengan maksimal. Jika sudah, nanti kami akan bantu pemenuhan kebutuhan alatnya," tutup Menkes Budi. (*)

Kemenkes Perluas Layanan KJSU ke RS TNI, POLRI, Perguruan Tinggi



Laporan: Yeti

JAKARTA, BP-Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI memperluas layanan kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi (KJSU) ke rumah sakit TNI, POLRI, dan RS milik perguruan tinggi. Perluasan layanan ini bertujuan untuk memperbaiki mekanisme rujukan dan peningkatan akses dan mutu layanan rumah sakit dan layanan penyakit prioritas Nasional.

Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan dr. Azhar Jaya mengatakan perluasan layanan KJSU sejalan dengan transformasi kesehatan pada layanan rujukan.

Dalam menjawab tantangan masalah kesehatan di Indonesia, pada 2021 Kementerian Kesehatan menyusun strategi dan arah kebijakan bidang kesehatan yang adaptif dan responsif melalui Transformasi Sistem Kesehatan, yang terdiri dari 6 pilar.

Salah satu pilarnya adalah Transformasi Layanan Rujukan, yaitu perbaikan mekanisme rujukan dan peningkatan akses dan mutu layanan rumah sakit dan layanan penyakit prioritas nasional. Perbaikan tersebut diwujudkan dengan pengembangan kemampuan layanan melalui pemenuhan

ketersediaan alat kesehatan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana penunjang layanan prioritas.

Untuk mendukung transformasi layanan rujukan tersebut, Kementerian Kesehatan memerlukan kontribusi dari TNI, POLRI, dan perguruan tinggi untuk menjadi bagian dari skema sistem rujukan dan jejaring pelayanan penyakit prioritas.

"Salah satu upaya pemerintah melalui Kementerian Kesehatan, dengan memberikan dukungan pemenuhan alat kesehatan layanan prioritas kanker, jantung, stroke, uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak (KIA) pada RS TNI, POLRI, dan perguruan tinggi," ujar dr. Azhar di Jakarta, Senin (1/1/2024).

Perluasan layanan KJSU ditetapkan pada 20 rumah sakit milik TNI, 5 rumah sakit milik POLRI, dan 11 rumah sakit milik perguruan tinggi negeri yang telah siap menerima alat kesehatan KJSU. Alat Kesehatan tersebut antara lain magnetic resonance imaging (MRI), USG Doppler untuk pemeriksaan kondisi pembuluh darah dan alirannya, alat untuk prosedur endourologi, laser holmium yang digunakan untuk memecahkan batu saluran kemih, Intra-Aortic

Balloon Pump (IABP) atau alat untuk meredakan beban kerja jantung memompakan darah, Ekokardiografi (EKG) untuk pemeriksaan jantung menggunakan ultrasound, dan alat pemeriksaan imunohistokimia (IHK) untuk deteksi kanker payudara.

Beberapa alat kesehatan telah sampai di rumah sakit dan telah dipasang serta dilakukan uji fungsi. MRI 1,5 T di RS Universitas Udayana dan RS Pendidikan Universitas Padjadjaran. USG Doppler di RS Bhayangkara Medan, RS Bhayangkara Makassar, RS Bhayangkara TK II HS. Samsuero Mertojoso Surabaya, RSU Bhayangkara Tk. II Sartika Asih, dan RSAU dr. M. Salamun. Laser holmium di RS Umum PAD Gatot Soebroto, RS Umum Bhayangkara Tk. I R.Said Sukanto, RS Umum AL Dr Mintoharjo, RSAL dr. Ramelan, dan RS Pusat AU dr. Esnawan Antariksa. IABP di RS Pendidikan Universitas Padjadjaran dan RS Pusat AU dr. Esnawan Antariksa.

Alat kesehatan yang lain secara bertahap sedang dan akan dikirim, dipasang, dan dilakukan uji fungsi di rumah sakit. (*)

Harian Pagi

Baubau Post

Kritik, Lugas, Independen

Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apa pun saat melakukan tugas jurnalistik. Dalam pelaksanaan tugas, wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post

Segala Berita yang diterbitkan oleh Baubau Post merupakan tanggungjawab penanggungjawab Redaksi

Pemimpin Umum : Fauzan NWA
 Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi : Ardi
 Redpel : Hengky TA
 Korlip : Hengky TA
 Redaktur : Alyakin, Kasrun
 Reporter : R a h m a n , ,mashuri, Jaya, Azis, , Lisma

Layouter : Ririn
 Pracetak : Aditya
 Cetak : Jamal

Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl. Raya Palagimata, BTN Palagimata, Blok K-L No. 1 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari Kota Baubau
 Tlp. 0402-2814207 - Email : baubaupost2019@gmail.com
 Percetakan : PT. Faren Grafika, Alamat: Jl. Raya Palagimata Blok K No 01, Kel. Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau

Penerbit : PT. Faren Grafika
 Komisaris : Erna Agule
 Direktur Utama : Andina Latief, SKM
 Manager Keuangan : Nabila D.A
 Manager Iklan dan Pemasaran : Fauzan
 Kepala Sirkulasi : Jamal
 Administrasi : Salvana
 Security :

Kepala Biro Wakatobi : Risman
 Kepala Biro Buton Utara : Fauzan
 Kepala Biro Buton : Rahman
 Kepala Biro Busel : Salvana
 Kepala Biro Buteng : Andini
 Kepala Biro Bombana :
 Kepala Biro Sultra :

Kontributor Baubau : Iphul, Kontributor Sultra : Amat Jr
 Kontributor Buton : Kontributor Butur : Kasrun,
 Kontributor Buteng : Hengki TA, Kontributor Busel : Amirul

Baubau : Jaya
 Agen Pasarwajo :
 Agen Butur : Samrihan

Harga Langganan : Dalam Kota Baubau Rp. 100.000,-/ bulan,
 Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim,
 Eceran Dalam Kota Baubau : Rp.5.000,-

Tiga Prajurit TNI AD Terlibat Penggelapan Motor Jatim Jadi Tersangka



Polda Metro Jaya dan Puspomad merilis kasus penggelapan dan pencurian ratusan kendaraan bermotor yang disimpan di Gudbalkir Puziad Sidoarjo yang melibatkan tiga anggota TNI AD

Laporan: Hamid

JAKARTA-- Tiga anggota TNI AD yang terlibat dalam kasus penggelapan ratusan kendaraan bermotor (ranmor) dan disimpan di Gudbalkir (gudang pengembalian dan pengiriman) Pusat Zeni Angkatan Darat (Pusziad), Sidoarjo, Jawa Timur ditetapkan sebagai tersangka.

"Betul sudah ditetapkan sebagai tersangka," kata Kadispenad Brigjen Kristomei Sianturi kepada wartawan, Rabu (10/1).

Ketiga anggota TNI AD tersebut yakni Mayor Czi BP, Kopda AS, Praka J. Ketiganya dijerat Pasal 408 KUHP dan atau Pasal 56 KUHP dan atau Pasal 126 KUHPM dan atau Pasal 103 KUHPM.

Kristomei me-

nyebut Pomdam V/ Brawijaya bersama dengan Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Timur masih terus melakukan penyidikan dan pengembangan atas perkara ini.

Kristomei juga menyatakan pihaknya akan memberikan sanksi tegas terhadap para anggota TNIAD yang terlibat dalam kasus pidana.

"Atas instruksi pimpinan TNI AD, bahwa kami akan menghukum anggota atau oknum anggota yang terlibat dan melanggar hukum. Dan kami akan kenakan ancaman hukuman secara maksimal," ucap Kristomei.

Peringatan Megawati di HUT PDIP: Kekuasaan Itu Tidak Langgeng

Sebelumnya, sebanyak ratusan motor dan puluhan mobil hasil peng-

gelapan ditemukan di Gudbalkir (gudang pengembalian dan pengiriman) Pusat Zeni Angkatan Darat (Pusziad), Sidoarjo, Jawa Timur.

Ratusan kendaraan itu terdiri dari 49 mobil dan 215 motor. Seluruh kendaraan hasil curanmor diduga bakal dikirim ke Timur Leste.

Kepala Pomdam V/ Brawijaya Kolonel Rendra Ardhani mengatakan barang hasil aksi kriminal ini dilakukan oleh tiga orang prajurit dari Puziad TNI AD, yakni Kopda AS, Praka J, Mayor BPR serta dua orang sipil.

"Untuk yang diduga sebagai pelaku dari oknum TNI AD, saat ini tetap diproses oleh Pomdam V/ Brawijaya," kata Rendra saat dikonfirmasi, Minggu (7/1). (dis/kid)

SYL Kembali Diperiksa di Bareskrim Terkait Kasus Pemerasan Firli



JAKARTA -- Eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) kembali diperiksa penyidik gabungan Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri terkait kasus pemerasan oleh Firli Bahuri.

Pengacara SYL Jamaluddin Koedoeboen mengatakan pemeriksaan bakal dilakukan di Gedung Bareskrim Polri, Kamis (11/1) hari ini. Ia memastikan kliennya juga bakal menghadiri pemeriksaan tersebut.

"Iya diperiksa, jam 10.00 WIB hari ini di Bareskrim Polri lantai enam," ujarnya saat dikonfirmasi.

Pakar Hukum Romli Atmasasmita Tolak Jadi Saksi Merintakan Firli

Kendati demikian,

Temuan PPATK Ungkap Bendahara 21 Parpol Terima Uang Ratusan Miliar



PPATK menemukan adanya penerimaan dana ratusan miliar dari luar negeri oleh bendahara 21 partai politik sepanjang 2022-2023. Ilustrasi

Laporan: Hadi

JAKARTA -- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan adanya penerimaan dana ratusan miliar dari luar negeri oleh bendahara 21 partai politik sepanjang 2022-2023.

"Ini bendahara bukan umum kali ya, ada bendahara di wilayah segala macam, dari 21 partai politik kita temukan," kata Kepala PPATK Ivan Yustia-vanda di kantornya, Rabu (10/1).

Ivan menjelaskan

pada 2022, ditemukan 8.270 transaksi dari 21 partai politik itu. Kemudian meningkat menjadi 9.164 transaksi pada 2023.

Ivan mengatakan 21 partai politik itu juga diketahui menerima dana luar negeri. Jumlahnya meningkat dari 2022 ke 2023.

"Di tahun 2022, penerimaan dananya hanya Rp83 miliar, di 2023 meningkat menjadi Rp195 miliar," ujar Ivan.

Ivan menjelaskan PPATK juga menerima laporan dari In-

ternational Fund Transfer Instruction (IFTI) terhadap 100 orang yang terdapat dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu. Ia menyebut dari 100 caleg tersebut, ada penerimaan total senilai Rp7,7 triliun dari luar negeri.

"Jadi orang ini menerima uang dari luar negeri sebesar itu," kata Ivan.

JK soal Koalisi Baru di Putaran Kedua: Biasanya yang Rangka 2 dan 3

Selain itu, ada 100 caleg DCT yang mengirim dana ke luar negeri dengan

total nilai Rp5,8 triliun.

Lalu, ada laporan transaksi pembelian barang yang secara tidak langsung terkait dengan upaya kampanye dan aktivitas lainnya. Nilai transaksi sekitar Rp592 miliar.

"Ada laporan transaksi pembelian barang yang ini secara tidak langsung kita ketahui ada terkait dengan upaya kampanye dan segala macam, itu ada 100 DCT yang melakukan transaksi pembelian barang senilai Rp592 miliar seki-

an," katanya.(*)

PPATK Laporkan Hasil Analisis Keuangan Caleg ke Aparat

Laporan: Alwan

Jakarta-Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menyampaikan hasil analisis atau informasi transaksi keuangan sejumlah pihak, termasuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu.

Kepala PPATK Ivan Yustia-vandana men-

gatakan, sepanjang 2023 pihaknya telah menyampaikan dua informasi pada KPK terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak yang terdaftar dalam DCT.

"Ada dua hasil analisis dan satu hasil pemeriksaan disampaikan kepada Polri," kata Ivan di kantornya, Jakarta, Rabu (10/1).

Lalu, ada satu infor-

masi yang disampaikan PPATK kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tiga informasi disampaikan kepada Badan Intelijen Negara (BIN).

Sementara pada periode 2022-2024, PPATK juga telah melaporkan hasil analisis atau hasil pemeriksaan transaksi keuangan caleg ke sejumlah instansi.

Secara rinci, lima hasil analisis disam-

paikan kepada Polri, sembilan hasil analisis kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), satu hasil analisis kepada Kementerian Lingkungan Hidup.

"Kepada Kejaksaan empat kasus, kepada BNN enam kasus, dan kepada Bawaslu 11 kasus. Berikutnya ada beberapa data yang tidak bisa kami sampaikan," kata dia.(*)

Jamaluddin mengaku masih belum mengetahui materi pemeriksaan yang akan dilakukan oleh penyidik terhadap kliennya.

"Belum tahu (materi pemeriksaan) pastinya. Kami ada bukti-bukti yang sekiranya (perlu) dibuktikan," jelasnya.

Polda Metro Jaya telah menetapkan Firli sebagai tersangka kasus pemerasan ter-

hadap SYL. Ia diduga melanggar Pasal 12 e dan atau Pasal 12 B dan atau Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 65 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman penjara seumur hidup.

Firli lantas mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat, 24 November 2023. Namun, hakim tunggal Penga-

dilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Imelda Herawati menyatakan tak dapat menerima gugatan praperadilan Firli.

Sementara itu Kejati DKI Jakarta juga telah mengembalikan berkas perkara Firli Bahuri ke Polda Metro Jaya karena dinyatakan belum lengkap. Sesuai ketentuan, berkas itu harus kem-

bali diserahkan oleh penyidik ke kejaksaan pada 11 Januari.

Alasan Yusril Mau Jadi Saksi Meringankan Firli di Kasus Pemerasan SYL

"Iya betul [paling lambat Kamis 11 Januari]," kata Plh Kasipenkum Kejati DKI Jakarta, Herlangga Wisnu Murdianto saat dihubungi, Selasa (9/1).(*)

Hasil Survey: Baubau Miliki 11 Zona Blankspot, 2024 Target Empat Zona Terselesaikan

Pewarta: Amran

BAUBAU, BP-- intensitas penggunaan jaringan internet di Kota Baubau menjadi kebutuhan primer mewujudkan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE) terkait arahan Presiden RI Joko Widodo mengenai percepatan layanan digital dan penguatan keamanan digital seperti disampaikan Pj. Wali Kota Baubau Dr. Muh. Rasman Manafi, SP., M.Si.

"Kami telah menyusun rencana pelayanan internet satu pintu. Tinggal pembahasan teknisnya dengan semua unit kerja pengguna," kata H. Andi Hamzah macmud, S.Sos, M.Si rabu pagi ini (10/1)

Disebutkan, hasil pemetaan dan survey kawasan di Kota Baubau, terdapat 11 zona blankspot, masing-masing: kawasan Kantor Kecamatan Bung; kawasan SD Negeri Wonco Kelurahan Kamponahao Kecamatan Bung; kawasan SMKN 6 Bau-Bau Kelurahan Kamponahao Kecamatan Bung; kawasan SMPS Integral Hidayatullah Kelurahan Kamponahao Kecamatan Bung; kawasan Kantor Kelurahan Gonda Baru Kecamatan Sorowolio; kawasan SD Negeri Gonda Kelurahan Gonda Baru Kecamatan Sorowolio; kawasan SMP Negeri 13 Bau-Bau Kelurahan Gonda Baru Kecamatan Sorowolio; kawasan SMKN 5 Bau-Bau

Kelurahan Gonda Baru Kecamatan Sorowolio; kawasan Kantor Kelurahan Kantalai Kecamatan Lea-Lea; kawasan SD Negeri Kecil Kolagana Kelurahan Palabusa Kecamatan Lea-Lea, dan kawasan SMP Negeri 16 Bau-Bau Kelurahan Palabusa.

Penyebutan langsung kawasan dimaksud menurut Andi Hamzah karena titik zona yang bersangkutan banyak menggunakan jaringan internet untuk pelayanan yang terintegrasi dengan sistem pemerintahan, baik skala lokal Kota Baubau maupun regional Sulawesi Tenggara, khususnya berkaitan dengan kawasan pendidikan dimana aplikasi yang digunakan langsung berhubungan ke level nasional, seperti database kesiswaan dan sebagainya.

Antisipasi zona blankspot tersebut, untuk tahun 2024 akan dilaksanakan pada 4 titik. "Tiga titik sebelumnya telah dikerjakan di tahun 2023, tetapi kita akan evaluasi kembali, apakah tiga zona tahun 2023 telah memanfaatkan dengan baik, atau bagaimana, dan 2024 ini teranggarkan pada 4 zona, mudah-mudahan bisa terantisipasi, sebab ini berkaitan penyuksesan Baubau dalam penyelenggaraan SPBE," tandas Andi Hamzah.

Dijelaskan, bila hasil evaluasi Diskominfo di beberapa tahun sebelumnya

upaya penuntasan zona blankspot di Kota Baubau telah dilakukan usulan ke Diskominfo Provinsi untuk diteruskan ke pemerintah pusat, berupa kesediaan BTS (Base Transceiver Station) untuk infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara perangkat komunikasi dan jaringan operator.

"Namun sampai sekarang belum terealisasi, makan yang diantisipasi melalui penganggaran APBD kendati sangat terbatas," kata Andi Hamzah.

Namun demikian pihaknya akan meminta arahan langsung Pj. Wali Kota Baubau, terkait pendekatan Pemerintah Kota Baubau dengan pihak Bakti Kominfo RI, lembaga negara yang bertugas sebagai penyedia infrastruktur dan ekosistem TIK bagi masyarakat yang didanai dari kontribusi KPU/USO Penyelenggara Telekomunikasi.

"Intinya kami ingin Baubau terlayani jaringan internetnya secara menyeluruh dan kita bisa mewujudkan layanan internet satu pintu ini untuk pengaturan yang lebih baik. Membicarakan dengan pihak BAKTI Kominfo RI karena mereka memiliki visi "menjembatani kesenjangan digital untuk masa depan Indonesia yang lebih baik," tutup Andi Hamzah (*)

Pemkot Baubau Apresiasi UPTD Puskesmas Lakologou Sukseskan Re-akreditasi



Pewarta: Amat Jr

BAUBAU, BP-Pemerintah Kota Baubau memberikan apresiasi terkait kerja keras semua pihak yang terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan survei Re-Akreditasi mulai dari Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas, Ketua-ketua Pokja dan anggota, Seluruh petugas puskesmas serta lintas Sektor yang telah berjuang keras untuk memastikan bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas Lakologou dan siap melaksanakan dan menjalani survei Re-Akreditasi dan tetap menjaga semangat, kekompakan, berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu pelayanan Kesehatan sehingga masyarakat dalam menerima layanan merasa aman, nyaman dan mendapatkan pelayanan yang terbaik selama berada di UPTD Puskesmas Lakologou.

Hal ini diungkapkan Asisten III Seta Kota Baubau La Ode Darussalam, S.Sos, M.Si saat pelaksanaan Re-Akreditasi UPTD Puskesmas Lakologou Selasa (9/1/2024).

Menurut La Ode Darussalam, pelaksanaan Re-Akreditasi dilakukan oleh Lembaga independen yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI. Dalam hal ini untuk Survey Re-Akreditasi UPTD Puskesmas Lakologou Menggunakan Lembaga Komite Akreditasi Kesehatan Pratama (KAKP) Kementerian Kesehatan RI. Namun demikian, akreditasi bukan hanya sekedar pemberian label atau sertifikat tetapi juga merupakan suatu proses evaluasi yang komprehensif dan mendapat pengakuan dari Lembaga

terkait pelayanan Kesehatan. Tujuan diberlakukannya akreditasi adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan Kesehatan. Dan melalui Akreditasi diharapkan puskesmas dapat menerapkan Prosedur Standar Dengan baik sehingga pasien merasa puas dengan pelayanan yang diberikan selama berada di UPTD Puskesmas Lakologou.

Dikatakan, pelayanan Kesehatan yang bermutu dan berkualitas menjadi salah satu prioritas utama bagi UPTD Puskesmas Lakologou. Dengan Motto "MELAYANI DENGAN HATI" Secara geografis jarak tempuh dari pusat kota kurang lebih 30 menit dengan jarak 8 km. Oleh karena itu, proses Re-Akreditasi yang dilaksanakan

saat ini merupakan komitmen dan Langkah untuk memastikan bahwa UPTD Puskesmas Lakologou memenuhi semua standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI dalam melakukan pelayanan di Puskesmas.

"Terima kasih kepada Bapak Ibu Tim Surveyor KAKP Kementerian Kesehatan RI yang telah meluangkan waktunya untuk melakukan survey Re-Akreditasi UPTD Puskesmas Lakologou selama 3 hari dari tanggal 9-11 Januari 2024 melalui luring dan harapannya bahwa melalui penilaian Re-Akreditasi dapat meningkatkan kinerja mutu layanan menjadi lebih baik. Bagi UPTD Puskesmas Lakologou, Kepala Puskesmas Ketua-Ketua Pokja

dan anggota serta seluruh staf UPTD Puskesmas Lakologou dapat bekerja sama dengan baik, kooperatif dan terlibat aktif selama kegiatan Survei. Semoga berkat Tuhan kita melimpah atas kita semua dan pada akhirnya kita memperoleh hasil yang memuaskan dan menggembirakan," katanya.

Ditambahkan, sejak UPTD Puskesmas Lakologou didirikan dalam meningkatkan mutu layanan sudah melakukan Akreditasi tahun 2018 dengan predikat Madya ini merupakan capaian yang sangat baik diantara 17 UPTD Puskesmas yang ada di Kota Baubau. Ini semua tidak terlepas dari peran Pemerintah Kota Baubau melalui Dinas Kesehatan dalam hal Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Sarana Prasarana serta memenuhi kelengkapan dokumen elemen-elemen penilaian yang harus dilengkapi. Dan pada Tahun ini 2024 Puskesmas Lakologou melakukan Re-Akreditasi yang diharapkan memperoleh predikat yang bisa meningkat. (*)

Atlet Karate Harumkan Nama Baubau di Kejurnas Karate Open Makassar



Pewarta: Amat Jr

BAUBAU, BP-Pemerintah Kota Baubau (Pemkot) Baubau melalui Kepala Di-

nas Pemuda Dan Olahraga Kota Baubau Dr. Mohamad Tasdik memberi apresiasi kepada atlet

Kota Baubau yang berhasil membawa pulang 8 medali yakni 4 medali emas, 2 medali perak dan

2 medali perunggu pada Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Open tournament Piala Menpora dan Piala Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berlangsung 22-24 Desember 2023 di Makassar.

Hal ini diungkapkan Kadispora Kota Baubau Dr Moh Tasdik, SH, M.Si saat

menunggu langsung kontingen Lemkari Baubau Karate Be-toambari Club bersama pengurus cabang Lemkari Kota Baubau Senpai Budi Utama di Pelabuhan murhum Baubau Selasa (26/12/2023).

Menurut Tasdik, pencapaian pada Kejurnas di Kota Makassar tak lepas dari perjuangan at-

let dan tangan dingin Pelatih/Manajer Senpai Haisu yang sudah bekerja keras menggembelng atlet karate dari Kota Baubau.

"Saya apresiasi, dan ini prestasi luar biasa, walaupun dengan segala keterbatasan, pembiayaan juga, tapi Alhamdulillah hasilnya maksimal, terus berprestasi untuk menambah se-

mangat anak bangsa demi memajukan pembangunan di Indonesia khususnya Kota Baubau. Terima kasih sudah berjuang dan raih prestasi "ujar Mohamad Tasdik.

Pada Kejurnas Kota Baubau mengikutsertakan 15 orang atlet Karate yakni 11 atlet putra dan 4 Atlet Putri. (*)